

## Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak: Membangun Solidaritas untuk Transformasi Sosial

### *Collective Action of Puspita Bahari Fisherwomen at Demak Coast: Building Solidarity for Social Transformation*

Amalia Risti Atikah, Mia Siscawati, & Shelly Adelina

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia  
Jakarta Pusat, Indonesia

amalia.risti1994@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 28 Februari 2025, direvisi 23 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

#### Abstract

Fisherwomen on the coast of Demak face various gender injustice amidst environmental crises and public policies that lack gender responsiveness. The Puspita Bahari community serves as a platform for fostering solidarity, advocacy, and grassroots leadership among these women fishers. This study was conducted in three villages supported by Puspita Bahari-Morodemak, Margolinduk, and Purworejo-located in the Bonang sub-district of Demak. By integrating the analysis of spatial, temporal, and violence dimensions (STV) within the feminist everyday political economy framework (Elias & Rai 2018) with the theoretical lens of collective action (Kabeer 2020), this paper examines how Puspita Bahari's collective action resists marginalisation and simultaneously promotes social transformation in the daily lives of coastal women. The research underscores the importance of recognising fisherwomen as agents of change, endowed with local knowledge and collective strength, in realising gender-just development. Incorporating their voices into policymaking processes is crucial for meaningful and sustainable social transformation.

Keywords: coastal communities, gender injustice, fisherwomen, collective action, social transformation

#### Abstrak

Perempuan nelayan di pesisir Demak menghadapi beragam masalah ketidakadilan gender di tengah krisis lingkungan dan kebijakan publik yang tidak responsif gender. Komunitas Puspita Bahari hadir sebagai wadah untuk membangun solidaritas, advokasi, dan kepemimpinan perempuan nelayan akar rumput. Penelitian ini dilakukan di tridesa dampingan Puspita Bahari, yaitu Desa Morodemak, Margolinduk, dan Purworejo di Kecamatan Bonang, Demak. Melalui integrasi antara analisis dimensi ruang, waktu, dan kekerasan (STV) dalam pendekatan *feminist everyday political economy* (Elias & Rai 2018) dengan kerangka aksi kolektif (Kabeer 2020), tulisan ini mengkaji bagaimana aksi kolektif yang dilakukan oleh Puspita Bahari melawan marginalisasi sekaligus mendorong transformasi sosial dalam kehidupan sehari-hari perempuan pesisir. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan perempuan pesisir sebagai subjek perubahan yang memiliki pengetahuan lokal dan kekuatan kolektif dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender. Memasukkan suara mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi kunci transformasi sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

Kata kunci: aksi kolektif, ketidakadilan gender, masyarakat pesisir, perempuan nelayan, transformasi sosial

## Pendahuluan

"Habis nikah, perempuan di sini bebannya makin banyak karena secara ekonomi pekerjaan nelayan tidak menentu hasilnya. Perempuan yang harus mikir *gimana* memenuhi kebutuhan, bahkan utang selalu perempuan. Laki-laki *ngga* mau tahu, yang penting melaut, dapat seadanya, sisanya urusan perempuan" (Ibu M 2024, Wawancara Desember).

Sepenggal kutipan di atas merupakan jeritan perempuan nelayan yang memikul beban luar biasa di pundak mereka. Para perempuan nelayan yang tangguh, aktif terlibat dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga. Mereka turut serta dalam menangkap ikan, mengolah hasil tangkapan laut, serta

menjual hasilnya di pasar lokal. Pada saat yang sama, mereka juga menjalankan kerja perawatan (Youwikijaya et al. 2023; Villarosa-Tanchuling 2017). Akan tetapi, peran perempuan dalam sektor perikanan sering diabaikan dan kurang diperhatikan dalam kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial karena adanya dikotomi kerja "produksi-reproduksi", "domestik-non domestik", atau "kerja upahan-bukan upahan" di dalam masyarakat (Pratiwi & Gina 2017). Kondisi ini diperparah budaya dan tafsir keliru naskah keagamaan yang memandang bahwa nelayan adalah laki-laki semata (Pratiwi & Gina 2017; Wahyuni, Niko, & Elsera 2022).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa marginalisasi perempuan nelayan bersifat sistemik.

Kitolelei et al. (2022) meneliti perempuan nelayan di Fiji yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dan pendekatan ilmiah untuk bertahan di tengah krisis iklim, sekaligus mewariskan keahliannya pada anak-anak perempuan mereka. Hal ini merupakan contoh regenerasi yang sangat baik untuk pemberdayaan perempuan di komunitas pesisir dan kepulauan dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan. Di Indonesia, upaya mitigasi bencana akibat krisis iklim belum banyak digambarkan (Wouthuyzen et al. 2017). Villarosa-Tanchuling (2023) menemukan kesamaan kondisi nelayan di negara Kamboja, Indonesia, Vietnam, dan Filipina bahwa perempuan nelayan sama-sama sulit mendapatkan akses pada faktor produksi sebab tanah dan usaha akuakultur dikelola oleh laki-laki. Azizi, Hikmah, dan Pranowo (2012) menyoroti pengecualian perempuan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada kegiatan produktif pengelolaan usaha perikanan, meskipun merekalah yang menjalankan hasil keputusan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan nelayan menyumbang lebih dari separuh

pendapatan rumah tangga (Laila & Amanah 2015). Mereka juga strategi *survival* seperti investasi serta kerja sambilan. Misalnya, menjadi koki hajatan, produksi ikan asin, pengupas kerang, penjaga warung, dan segala hal yang bisa menghasilkan uang (Wardhani 2017; Wahyuni 2017). Sayangnya, kontribusi ini belum berbanding lurus dengan pengakuan, dukungan kebijakan, maupun distribusi sumber daya.

Berangkat dari hal tersebut, lahir berbagai gerakan yang memperjuangkan hak dan keadilan bagi perempuan nelayan. Salah satunya, komunitas perempuan nelayan *Puspita Bahari* di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terus tumbuh dari solidaritas yang menolak bungkam saat menghadapi ketidakadilan. Mereka memperjuangkan pengakuan sebagai nelayan dalam KTP, membentuk koperasi perempuan, melawan kekerasan domestik, serta mengadvokasi isu lingkungan. Aksi kolektif ini merupakan perlawanan terstruktur yang dibangun dari pengalaman keseharian, yang menjadi titik tolak transformasi sosial di wilayah pesisir.



**Gambar 1. Situasi Banjir Rob di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**

Sumber: Dokumentasi pribadi 2024

Kondisi di pesisir Kabupaten Demak semakin kompleks akibat krisis iklim dan proyek pembangunan yang tidak inklusif. Banjir rob terus berlangsung secara signifikan selama lebih dari dua dekade, ditambah proyek tanggul laut Semarang-Demak yang memperparah abrasi dan rob (Utami 2024). Beberapa Desa bahkan telah tenggelam permanen dan rob masih terus meluas hingga ke pusat Kota Demak. Kritik diarahkan pada minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan proyek, yang berpotensi mengabaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, termasuk perempuan nelayan yang sangat bergantung pada ekosistem

pesisir (Utami 2024). Narasi perempuan nelayan adalah cermin dari perjuangan lebih luas untuk menulis ulang kebijakan pembangunan dengan perspektif gender guna mengatasi tantangan, seperti subordinasi, diskriminasi, dan keterbatasan akses layanan mendasar untuk perempuan (Namirah & Ruwaida 2023). Tantangan memang lebih bersifat struktural sekaligus kultural. Oleh karena itu, aksi kolektif perempuan menjadi penting, sebagai proses menuju perubahan positif yang dilakukan melalui kelompok secara sadar dan bersama-sama.

Sejumlah penelitian menunjukkan keberhasilan organisasi akar rumput yang dipimpin perempuan dalam mendorong transformasi sosial di berbagai konteks, seperti partisipasi publik, inklusi keuangan, dan menantang norma gender (Bogacz-Wojtanowska et al. 2023; Ghosh & Ghosh 2024; Herdiansyah et al. 2019). Aktivisme ini memperlihatkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang untuk memimpin dan berjejaring, mereka tidak hanya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi komunitas, tetapi juga memperluas representasi politik mereka (González-Malabet 2023). Meskipun demikian, patriarki struktural dan tokenisme tetap menjadi hambatan serius (Safira & Dar 2024). Pengalaman ini menegaskan pentingnya mendokumentasikan praktik baik di tingkat lokal untuk memperkuat aksi kolektif perempuan akar rumput untuk transformasi sosial, termasuk di sektor perikanan.

Naila Kabeer (2020; 2012) menekankan bahwa aksi kolektif memungkinkan perempuan untuk membangun kesadaran diri, solidaritas, dan kapasitas untuk bertindak. Konsep ini menegaskan bahwa ketika perempuan berkumpul, mereka menciptakan makna bersama tentang keadilan yang mampu mengubah norma. Menurut Kabeer (2020), aksi kolektif merupakan salah satu bentuk agensi perempuan yang dinamis dan kontekstual, melalui proses historis dan sosial perempuan dalam berjuang secara kolektif. Ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana komunitas seperti Puspita Bahari dapat memobilisasi anggotanya untuk melawan marginalisasi yang sistemik. Aksi kolektif Puspita Bahari menjadi wujud nyata dari kerja transformatif yang memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga, komunitas, dan relasi dengan negara. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin perubahan.

Pengalaman perempuan dilihat sebagai arena politik tempat negosiasi kuasa berlangsung. Pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah "*Bagaimana aksi kolektif yang dilakukan perempuan nelayan dalam komunitas Puspita Bahari menjadi strategi untuk melawan marginalisasi dan mendorong transformasi sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari?*" Pertanyaan tersebut akan dijawab menggunakan kerangka aksi kolektif dari Kabeer (2012) dikombinasikan dengan pendekatan *Feminist Everyday Political Economy* (Elias & Rai 2018). Pendekatan ini memberi perhatian pada bagaimana ruang (*space*), waktu (*time*), dan kekerasan (*violence*) berperan dalam membentuk kehidupan perempuan. Integrasi ini memperkuat pemahaman bahwa aksi kolektif bukan hanya respons, melainkan strategi untuk membongkar relasi kuasa yang menindas.

## Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan kerangka *Feminist Everyday Political Economy* dari Elias dan Rai (2018) yang menguraikan reproduksi sosial dalam kehidupan para perempuan nelayan melalui tiga dimensi, yaitu *space* (ruang), *time* (waktu), dan *violence* (kekerasan) atau biasa disingkat STV. Ruang mengacu pada lingkungan fisik dan sosial yaitu perempuan berinteraksi dengan sistem ekonomi. Waktu menyoroti beban ganda perempuan dalam menjalankan berbagai peran. Kekerasan mencakup tidak hanya fisik, tetapi juga ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural yang memperkuat marginalisasi perempuan. Pendekatan ini membantu mengungkap kompleksitas ketidakadilan gender dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Analisis STV memungkinkan dalam menganalisis pengalaman perempuan nelayan dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang kerap menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan gender, tantangan lingkungan, seperti banjir rob serta marginalisasi dalam kebijakan publik. Akan tetapi, kerangka ini tidak secara eksplisit membahas aksi kolektif perempuan sebagai strategi perubahan sosial. Oleh karena itu, penulis mengintegrasikannya dengan kerangka konseptual aksi kolektif perempuan dari Naila Kabeer (2012; 2020).

Kerangka ini menempatkan aksi kolektif sebagai salah satu wajah dari agensi perempuan yang paling transformatif, yakni kapasitas untuk membangun solidaritas, menyuarakan pengalaman bersama, dan menantang ketidakadilan struktural melalui organisasi komunitas, gerakan sosial, atau serikat pekerja. Aksi kolektif ini memungkinkan perempuan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi dan masyarakat, sekaligus sebagai medium untuk menantang norma patriarkal dan ketimpangan struktural melalui partisipasi dalam gerakan sosial. Kabeer (2012; 2020) melihat aksi kolektif sebagai salah satu bentuk agensi perempuan yang reflektif dan politis dalam memperjuangkan keadilan sosial. Kerangka ini relevan untuk membaca praktik pergerakan perempuan nelayan Puspita Bahari, terutama saat dikaitkan dengan pendekatan *Feminist Everyday Political Economy* dari Elias dan Rai (2018) yang menelusuri bagaimana ketimpangan gender termanifestasi dalam dimensi ruang, waktu, dan kekerasan (STV). Melalui aksi kolektif, perempuan nelayan tidak hanya mengatasi beban berlapis dalam ruang hidup yang terancam, waktu yang terkuras, dan kekerasan, tetapi juga membangun agensi politik kolektif yang mampu menantang eksklusi mereka dari pengambilan keputusan dan pembangunan pesisir yang berkeadilan.

## Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2024 di tiga desa dampingan Puspita Bahari, yaitu Desa Morodemak, Desa Purworejo, dan Desa Margolinduk, di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penulis menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan anggota komunitas Puspita Bahari bersama dua orang perwakilan dari masing-masing desa untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam pembagian kerja, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi beban kerja perempuan secara menyeluruh. Dalam FGD ini, digunakan alat analisis gender yaitu kerangka Harvard dan Moser (March et al. 1999). Metode ini juga melihat pandangan kolektif mengenai peran perempuan dalam komunitas, dinamika pembagian kerja, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Setelah FGD, dilakukan wawancara mendalam secara terpisah pada masing-masing lima orang anggota Puspita Bahari, sekretaris Desa Morodemak, ketua RW, Masnuah selaku pendiri Puspita Bahari, serta masyarakat sekitar yang tidak tergabung dalam Puspita Bahari. Setelah itu, observasi dilakukan selama dua hari penuh terhadap aktivitas perempuan nelayan dan lingkungan fisik tiga Desa dalam Kecamatan Bonang yang hampir seluruhnya sudah terendam rob. Saat observasi berlangsung, dilakukan wawancara mendalam terhadap satu keluarga yang terdiri atas perempuan nelayan, suami, dan anak untuk mempelajari peran gender, kalender aktivitas, dan relasi gender dalam keseharian hidup mereka.

## Marginalisasi Perempuan Nelayan di Pesisir Demak dalam Dimensi STV

Perempuan nelayan memainkan peran yang sangat penting dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi

keluarga, tetapi kontribusi mereka jarang diakui secara formal. Konsep ruang atau *space* menyoroti pentingnya memperhatikan dimensi fisik dan sosial dari lingkungan ketika aktivitas ekonomi terjadi, termasuk rumah tangga, tempat kerja, dan ruang publik lainnya saat perempuan berinteraksi dengan sistem ekonomi.

“Cuaca buruk bikin nelayan *nggak* bisa melaut, akses ke Dukuh Tambak Polo (Desa Purworejo) rusak total karena banjir rob, ditambah lagi konflik dengan proyek penambangan pasir yang malah memperparah semuanya” (Ibu DY 2024, FGD 7 Desember).

Pemahaman tentang ruang membantu mengidentifikasi pengaruh struktur sosial dan ekonomi pada akses perempuan terhadap sumber daya. Henri Lefebvre (1991) dalam *“The Production of Space”* menyatakan bahwa ruang adalah produk sosial yang mencerminkan hubungan kekuasaan. Dalam konteks perempuan nelayan, ruang yang digunakan untuk menangkap ikan dan mengelola hasil tangkapan merupakan ruang yang dirasakan (*perceived space*), sementara kebijakan dan regulasi yang membatasi akses mereka adalah ruang yang diwakili (*conceived space*). Pengalaman sehari-hari mereka menghadapi tantangan, seperti banjir rob atau konflik dengan proyek yang merusak lingkungan menggambarkan ruang yang dialami (*lived space*).

Ruang produksi (laut, tambak, dan pasar) didominasi oleh laki-laki, yang menciptakan batasan-batasan bagi perempuan dalam berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi. Ruang adalah arena kekuasaan yang diperebutkan, perempuan nelayan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, baik di tingkat lokal komunitas maupun nasional. Perempuan rentan mengalami kelelahan yang kronis karena reproduksi sosial (*depletion through social reproduction*) yang dilanggengkan.



Gambar 2. Ruang Hidup Perempuan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2024

Akses dan kontrol terhadap sumber daya menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Perempuan dewasa menemui keterbatasan akses sumber daya ekonomi, seperti modal dan peralatan, yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam kegiatan perikanan dan usaha kecil. Meskipun mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, tetapi terpaksa bergantung pada suami atau anggota keluarga laki-laki untuk mendapatkan akses. Anak perempuan dan anak laki-laki juga mengalami perbedaan dalam akses pendidikan dan pelatihan. Anak laki-laki cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan untuk melanjutkan pendidikan formal, sementara anak perempuan diharapkan langsung membantu pekerjaan rumah tangga atau dinikahkan. Ketimpangan ini menciptakan siklus yang sulit diputus, yaitu perempuan dan anak perempuan terus terpinggirkan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya yang penting untuk kesejahteraan mereka.

Akses ke jaringan sosial merupakan salah satu aset penting bagi perempuan nelayan untuk memperkuat posisi mereka dalam komunitas. Di sinilah peran Puspita Bahari menjadi strategis, menciptakan ruang kolektif bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, tantangan regenerasi kepemimpinan menjadi serius karena banyak anak perempuan yang menikah lalu merantau, serta dilarang suami untuk bergabung. Selain itu, stigma dari masyarakat yang menganggap Puspita Bahari sebagai tempat para pemberontak karena banyak perempuan korban KDRT yang berani mengajukan cerai dan semakin banyak perempuan yang berani melaut secara terang-terangan.

"Sebenarnya kita *kan* capek, ya daripada laki. Kalau laki ke laut *doang*. *Udah* pulang laut, ya *udah*. Kalau perempuan dari subuh ayo, kalau pekerjaan belum beres. Terus *aja...* ngelola uang juga, ya kita yang *megang* orang kita yang jual. Suami *mah* cuma tahu nyari *aja...* urusan di rumah biasanya kita semua" (Ibu F 2024, Wawancara Desember).

Dimensi waktu memperlihatkan bagaimana perempuan nelayan terjebak dalam eksploitasi temporal. Di sini, perempuan terlibat dalam aktivitas produksi sekaligus kerja perawatan, sebagaimana tercermin pada kutipan di atas. Meskipun suami kadang berpartisipasi namun kontribusinya terbatas. Perempuan nelayan Demak juga harus bangun lebih pagi dan tidur lebih larut dibandingkan laki-laki untuk mengatasi tantangan, seperti rob atau menyiapkan bekal melaut—mereka pun turut serta. Kondisi ini menggambarkan bagaimana waktu mereka

tereksploitasi dalam beban ganda yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis perempuan nelayan. Mereka sering mengalami kelelahan kronis, stres, dan masalah kesehatan lainnya kurangnya waktu untuk istirahat. Kondisi ini dapat berdampak pada kesejahteraan jangka panjang mereka.

Dimensi kekerasan STV mencakup kekerasan struktural dan psikologis. Banjir rob yang terus menerus, kurangnya infrastruktur publik, dan kebijakan tidak responsif gender merupakan contoh nyata kekerasan struktural yang memperburuk kerentanan perempuan. Sementara, kekerasan psikologis terjadi melalui internalisasi norma patriarki yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik. Akibatnya, perempuan terjebak siklus penindasan yang sulit dipatahkan tanpa intervensi kebijakan yang kuat dan perubahan sosial yang mendasar (Elias & Rai 2018). Masnuah, pendiri Puspita Bahari, mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di sana dan cenderung dibiarkan oleh lingkungan, termasuk tokoh masyarakat. Salah satu narasumber, Ibu E, mengisahkan bahwa belasan tahun ia dipukuli oleh suaminya hampir setiap hari tanpa tahu harus bagaimana. Padahal, ia adalah pencari nafkah utama. Tetangga sekitarnya pun seolah tutup mata melihat Ibu E dipukuli hingga berdarah. Dengan bantuan advokasi dari Puspita Bahari, Ibu E akhirnya berani mengambil langkah tegas untuk berpisah. Kisah ini mencerminkan internalisasi patriarki yang mengakar memperkuat subordinasi perempuan dalam rumah tangga, sementara kurangnya dukungan sosial dan pengetahuan akan hak membuat para korban merasa buntu.

Terbatasnya akses pendidikan juga termasuk ke dalam kekerasan struktural karena menghilangkan peluang perempuan nelayan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan penghidupan keluarga, sementara kontribusi mereka tidak dihargai. Semua perempuan nelayan yang diwawancarai sepakat bahwa tidak berharap anak-anak mereka menjadi nelayan di kemudian hari karena beratnya hidup yang mereka jalani selama ini. Mereka terus mendorong anak-anaknya bersekolah walau harus ke luar dari desa.

Ada problem juga di sini yaitu anak laki-laki lebih diprioritaskan mengenyam pendidikan tinggi sementara anak perempuan lebih didorong untuk bekerja selain nelayan atau menikah. Salah satu anak perempuan yang menjadi narasumber mengisahkan

bahwa ia dan teman-teman sebayanya didorong untuk bekerja di Bank Mekar. Di sana, eksploitasi tenaga terjadi lewat target kerja yang tak wajar, serta rentan bahaya karena banyak yang membenci Bank Mekar. Setelah memutuskan untuk berhenti, narasumber didorong untuk segera menikah.

Pada realitanya, antar dimensi saling berkelindan dalam menguatkan kerentanan perempuan. Salah satu narasumber, Ibu D, mengisahkan bahwa ia pernah terpaksa membantu persalinan di atas perahu karena akses menuju fasilitas kesehatan terputus oleh banjir rob. Sayangnya, bayi yang ia tolong akhirnya meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit. Pengalaman tersebut merupakan gambaran nyata bagaimana dimensi ruang dan kekerasan struktural saling terkait. Tidak tersedianya akses yang layak ke fasilitas kesehatan akibat kondisi geografis dan infrastruktur yang buruk adalah cerminan eksploitasi ruang, sementara ketidakpedulian pemangku kebijakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat merupakan kekerasan struktural.

Penelitian ini menegaskan bahwa dimensi ruang, waktu, dan kekerasan dalam teori STV saling terkait dalam membentuk pengalaman perempuan nelayan di tengah krisis iklim dan marginalisasi sosial. Tanpa perubahan kebijakan berkeadilan gender, eksploitasi perempuan nelayan akan terus meningkat, mengancam keberlanjutan komunitas pesisir. Pendekatan berbasis Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap ruang, waktu, dan sumber daya, sekaligus mengurangi beban berlapis dan kekerasan yang mereka alami.

Untuk mengatasi marginalisasi ini, diperlukan perubahan struktural dalam kebijakan publik yang berfokus pada keadilan gender. Program peningkatan keterampilan perempuan dan pembekalan kapasitas negosiasi penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Upaya Puspita Bahari di Demak, melalui pelatihan dan advokasi hak perempuan, dapat menjadi model bagi komunitas pesisir lainnya. Dalam konteks ini, aksi kolektif menjadi strategi utama perempuan nelayan untuk melawan marginalisasi. Tidak hanya bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga memimpin perubahan sosial dan struktural demi masa depan yang lebih inklusif.

## Aksi Kolektif Puspita Bahari sebagai Strategi Transformasi Sosial

Naila Kabeer (2012) menekankan bahwa aksi kolektif bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga arena pembentukan agensi perempuan yang menantang norma dan struktur yang menindas. Ketika perempuan berkumpul, mereka membangun *shared meanings*—makna bersama—tentang ketidakadilan yang dialami. Perempuan yang berorganisasi akan mampu menentang batasan patriarkal dan mengakses peluang tersembunyi (Kabeer 2020). Perlawanan perempuan nelayan di Puspita Bahari mencerminkan kekuatan transformatif dari aksi kolektif sebagaimana dimaksud Kabeer. Akar gerakannya tumbuh dari pengalaman langsung menghadapi ketidakadilan.

Sejak berdiri pada tanggal 25 Desember 2005, Puspita Bahari terus tumbuh menjadi motor penggerak untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dimulai dari 30 perempuan nelayan mandiri di Desa Morodemak, komunitas ini terus menyebar ke desa pesisir lain di Kabupaten Demak, serta menjalin jejaring dengan komunitas nelayan lain di Indonesia hingga mancanegara. Masnuah mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 100 orang anggota Puspita Bahari yang terdiri atas para perempuan nelayan tangkap tradisional, pelaku budidaya akuakultur, dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki rasa solidaritas terhadap marginalisasi perempuan nelayan dan kelompok rentan. Dua dekade sejak didirikan, Puspita Bahari telah berhasil membantu lebih dari 1.500 perempuan pesisir dan kelompok rentan lainnya. Para perempuan ini melakukan kerja-kerja kolektif untuk mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata, mulai dari menyuarakan kebutuhan hingga mendorong pengakuan perempuan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya, khususnya di sektor perairan dan perikanan. Puspita Bahari mengajarkan bahwa perempuan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memimpin perjuangan.

Dalam situasi ini, Puspita Bahari berperan penting dalam mengadvokasi hak atas ruang hidup dan ruang ekonomi perempuan nelayan. Salah satu inisiatif penting mereka—yang menjadi inspirasi bagi komunitas perempuan nelayan lainnya—adalah upaya mendapatkan pengakuan formal perempuan nelayan sebagai "nelayan" dalam dokumen resmi, seperti KTP dan Kartu Nelayan. Pengakuan ini membuka akses perempuan terhadap program pemerintah, seperti subsidi alat tangkap dan pelatihan keterampilan. Salah

satu keterampilan yang diajarkan adalah pembuatan olahan pangan dari hasil tangkapan supaya bisa lebih awet dan bernilai tinggi. Saat mengunjungi Sekretariat Puspita Bahari, terlihat beragam hasil olahan laut buatan tangan perempuan nelayan, sebagai hasil nyata pelatihan. Perempuan nelayan yang tertarik bergabung dalam tim produksi kini mampu mengoptimalkan waktu mereka, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai kontributor utama dalam rumah tangga dan komunitas. Pembuatan olahan pangan ini punya fleksibilitas waktu serta tidak menargetkan kuantitas produksi. Mereka bebas mengerjakan di rumah atau di sekretariat sesuai preferensi. Sekretaris Desa Morodemak menyatakan bahwa hampir 90 persen warga hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kemampuan menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis menjadi sangat penting.

Tak hanya seputar produksi, Puspita Bahari juga mendirikan koperasi perempuan. Di sana, disediakan akses modal yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pemodal besar yang sulit diakses tanpa jaminan harta benda atau bank keliling yang menjerat. Keberadaan bank keliling sangat menyengsarakan, tetapi terpaksa dijadikan pilihan, terutama saat harus terus meninggikan rumah agar tidak tenggelam banjir rob atau saat kondisi tidak memungkinkan untuk melaut. Oleh karena itu, koperasi ini menyediakan pinjaman sekaligus berfungsi sebagai tabungan dan jaring pengaman sosial. Dengan sistem simpan-pinjam yang fleksibel, perempuan nelayan dapat mengatur waktu peminjaman dan pengembalian berdasarkan musim panen laut atau produksi olahan. Mereka jadi lebih leluasa mengelola keuangan tanpa tekanan dari pihak luar. Koperasi juga mendorong solidaritas antar anggota, menciptakan ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan membagikan pengalaman dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

“Koperasi seperti ini juga kami buat di Tambakpolo loh, kami diajarkan di Puspita Bahari lalu dipersilakan punya kemandirian untuk *bikin* sendiri di dukuh kami. Ini sangat memudahkan, soalnya kalau harus ke sini dulu (Morodemak), aksesnya sulit. Jalan ke dukuh kami *udah* tertutup air dan *ngga* bisa dilalui motor. Tadi *aja* kami ke sini naik sepeda dan harus buru-buru balik sebelum malam” (Ibu SD 2024, Wawancara Desember).

SD termasuk salah satu dari 31 perempuan nelayan pertama yang mendapatkan pengakuan identitas nelayan di KTP. Ia menjadi agen perubahan yang dilahirkan oleh Puspita Bahari untuk menjadi katalis perubahan di Dukuh Tambakpolo dengan

mengajak perempuan nelayan lain untuk bersatu membangun sistem yang lebih baik serta pertemuan rutin sebagai wadah berbagi solusi. Selain koperasi dan pelatihan pengolahan pangan, pelatihan tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan mangrove juga diselenggarakan oleh Puspita Bahari yang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk mereka.

Akan tetapi, sebagaimana sempat disinggung di atas, kehidupan nelayan pesisir Demak, terutama perempuan, terus terhimpit oleh kombinasi dampak dari penambangan pasir laut, pembangunan Tol Semarang-Demak yang merusak sekitar 46 hektare hutan mangrove, sekaligus pemasangan pagar laut yang membatasi akses melaut. Penambangan pasir laut mempercepat abrasi pantai, menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan tambak, serta menurunnya hasil tangkapan ikan, yang memaksa banyak perempuan beralih profesi dari petani menjadi nelayan atau pedagang keliling. Pembangunan tol yang disebut sebagai tanggul laut mengorbankan ekosistem mangrove yang vital sebagai pelindung alami dari abrasi dan habitat biota laut. Sementara itu, pemasangan pagar laut membatasi ruang gerak nelayan, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi area tangkap.

Akibatnya, perempuan nelayan menghadapi beban ganda: kehilangan mata pencaharian, meningkatnya pekerjaan domestik akibat banjir rob, kesulitan mengakses layanan kesehatan, serta tekanan psikologis karena status sosial yang tidak diakui secara resmi. Oleh karena itu, Masnuah bercerita bahwa pada bulan Juli 2023, masyarakat pesisir dan anggota Puspita Bahari melakukan aksi diam sebagai bentuk protes. Hingga saat ini, Puspita Bahari bersama jejaring nelayan lainnya dalam berbagai forum terus aktif menyuarakan dan menuntut hadirnya negara dalam bentuk kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal. Dalam konteks ini, peran Puspita Bahari sangat terasa, tidak hanya di Kecamatan Bonang tetapi juga di wilayah-wilayah lain seperti Dukuh Timbulsloko di Kecamatan Sayung yang hampir seluruh areanya terendam air laut. Tak cukup sampai di situ, Puspita Bahari mulai melebarkan sayap menyuarakan urgensi penanganan krisis iklim pada berbagai forum internasional bersama komunitas nelayan lainnya.

Hal krusial lainnya yang dilakukan oleh Puspita Bahari yakni berdiri sebagai garis terdepan memerangi segala bentuk kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan dan kelompok rentan, tanpa pandang bulu. Puspita Bahari bekerja sama dengan LBH APIK Semarang memberikan advokasi hukum dan pendampingan;

menjadi ruang aman bagi para korban untuk bercerita. Mereka tak gentar walau sering menerima ancaman dari berbagai pihak yang tidak terima dengan perubahan ini. Kekerasan juga tercermin dalam polemik *tanah musnah* yang dilakukan oleh perangkat desa-desa pesisir. *Tanah musnah*, dalam Permen ATR/BPN Nomor 17/2021, merujuk pada bidang tanah yang tak dapat difungsikan sebagaimana mestinya karena mengalami perubahan bentuk akibat peristiwa alam, seperti abrasi, banjir rob, dan lainnya. Saat warga berada dalam posisi rentan – baik secara ekonomi dan administratif – oknum perangkat desa memanfaatkan celah regulasi dan kuasa untuk membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang sangat rendah.

Tanah ini kemudian dijual kembali oleh oknum perangkat desa kepada investor maupun proyek pembangunan dengan harga berlipat ganda. Hasilnya, terdapat kasus seperti perusahaan melakukan pemagaran dan melarang warga beraktivitas di sekitarnya. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan yang terancam kehilangan akses ke wilayah tangkapan. Masnuah mengisahkan bahwa banyak perempuan nelayan tangkap yang kemudian mencoba beradaptasi menjadi nelayan tambak sederhana, meskipun hasilnya sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain pemagaran, terdapat pula beberapa kasus oknum perangkat desa menyewakan tanah yang belum laku kepada warga dengan harga tinggi serta terlibat dalam komplotan mafia tanah dengan memalsukan surat keterangan kepemilikan *tanah musnah* untuk mendapatkan ganti rugi proyek Pembangunan.

Perempuan nelayan rentan karena umumnya tidak memiliki dokumen kepemilikan atas namanya. Dampaknya, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya tanah yang penting untuk kehidupan dan penghidupan mereka. Di Kabupaten Demak, terdapat beberapa peraturan daerah dan desa yang mengatur pemanfaatan lahan, salah satunya Perda Kabupaten Demak Nomor 6/2011 yang menetapkan zonasi penggunaan lahan, termasuk kawasan pesisir, dan memberikan wewenang hukum bagi pemerintah desa dan daerah dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatannya. Selain itu, Peraturan Bupati Demak Nomor 6/2024 juga memberikan pedoman dalam menyusun anggaran, termasuk alokasi untuk pengelolaan aset. Sayangnya, pengelolaan ini sering tidak transparan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa, seperti membeli *tanah musnah* dengan harga murah dan menjualnya dengan harga sangat tinggi kepada pihak ketiga.

Praktik-praktik tersebut terjadi memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang status hukum tanah dan absennya akses atas bantuan hukum. Keberadaan Puspita Bahari sangat penting karena memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan korban sebagai kelompok rentan. Kasus penguasaan *tanah musnah* di pesisir Demak menggambarkan situs eksploitatif yang sulit dipatahkan karena ketidakadilan ini sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Terjadi dalam relasi kuasa antara perangkat desa dan pihak rentan seperti perempuan nelayan. Pihak rentan akan terus dirugikan melalui praktik penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan hilangnya akses atas tanah dan sumber daya, memperparah kemiskinan dan ketergantungannya. Struktur sosial dan kebijakan lokal yang tidak responsif gender semakin melanggengkan ketidakadilan ini sehingga pada akhirnya, perempuan nelayan semakin rentan secara ekonomi dan sosial (OXFAM 2013). Dalam menghadapi siklus eksploitatif ini, aksi kolektif Puspita Bahari memainkan peran krusial. Melalui pendampingan yang memperkuat kapasitas negosiasi dalam memperjuangkan hak atas sumber daya dan menantang relasi kuasa tidak setara (Kabeer 2020).

Puspita Bahari aktif membangun jaringan yang dapat memengaruhi kebijakan publik terkait penanganan dampak krisis iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jaringan ini meliputi beberapa komunitas dan lembaga, seperti KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), LBH Semarang, KRUHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), serta Yayasan Humanis. Dalam kerangka Kabeer (2020), Puspita Bahari kuat karena tidak hanya membangun solidaritas internal, tetapi juga bergerak secara politis di ranah publik dan struktural melalui jejaring seperti ini. Puspita Bahari bergerak menuju posisi sebagai aktor warga negara yang menuntut pertanggungjawaban negara.

Hal yang perlu diteladani dari Puspita Bahari yaitu kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman dalam menggaungkan aksi kolektif mereka, melalui media sosial. Puspita Bahari juga rutin menggelar forum diskusi publik yang bermitra dengan berbagai komunitas nelayan, insan media, dan akademisi baik secara daring maupun luring. Aksi kolektif yang dilakukan oleh perempuan nelayan di bawah Puspita Bahari menunjukkan praktik pemberdayaan yang kompleks dan berlapis, yang dapat dipahami secara mendalam melalui kerangka Naila Kabeer (2020). Dalam hal ini, *power within* terlihat dari tumbuhnya kesadaran

diri perempuan nelayan akan hak, kontribusi, dan kapasitas mereka yang selama ini disubordinasikan. *Power with* tercermin dari solidaritas perempuan untuk saling mendukung dan membangun jejaring antar komunitas pesisir sedangkan *power to* diekspresikan melalui tindakan nyata, seperti mendirikan koperasi perempuan, mengadvokasi status "nelayan" dalam KTP, serta protes terhadap proyek yang merusak lingkungan. Dalam bingkai Kabeer, aksi kolektif bukan hanya alat untuk memperjuangkan hak, tetapi juga ruang produksi makna baru dan artikulasi agensi politik perempuan yang selama ini disingkirkan dari pengambilan keputusan.

Temuan ini selaras dengan laporan OXFAM (2013) yang menunjukkan bahwa aksi kolektif perempuan menjadi kunci untuk membuka akses terhadap pasar dan memperkuat posisi perempuan dalam rantai nilai. OXFAM juga menekankan pentingnya keberadaan ruang aman dan relasi yang setara di dalam kelompok agar potensi transformatif tersebut benar-benar terwujud. Dalam konteks Puspita Bahari, ruang aman ini terbangun melalui proses pendampingan yang berkelanjutan, dukungan antara anggota, dan penguatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan usaha maupun advokasi sosial. Kemitraan strategis yang dibangun oleh Puspita Bahari turut memperluas akses perempuan terhadap sumber daya dan pengaruh politik. Sementara itu, menurut FAO (2018), aksi kolektif perempuan di sektor perikanan sangat strategis dalam memperbaiki ketimpangan gender yang kerap menghambat akses perempuan terhadap sumber daya, pelatihan, dan pengambilan keputusan.

FAO menyoroti bahwa keberhasilan organisasi perempuan dalam perikanan kecil sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu menjembatani kebutuhan praktis (seperti modal dan alat produksi) dengan perubahan strategis yang menantang norma sosial yang diskriminatif. Puspita Bahari telah menunjukkan peran ganda ini: menyelesaikan masalah konkret, seperti jeratan utang dan penghidupan, sekaligus mendorong transformasi identitas dan kepemimpinan perempuan pesisir. Lebih jauh lagi, Evans dan Nambiar (2013) mengusulkan bahwa aksi kolektif perempuan berpotensi mendorong perubahan pada tiga tingkat: (1) agensi individu melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif; (2) norma sosial melalui penggeseran pandangan terhadap peran dan kapasitas perempuan; dan (3) struktur kelembagaan melalui pembentukan aliansi, pengaruh terhadap kebijakan, serta partisipasi dalam forum publik. Dalam konteks

Puspita Bahari, ketiga bentuk perubahan ini terlihat nyata. Dari individu seperti Ibu SD yang menjadi pemimpin lokal, hingga norma yang mulai menerima perempuan sebagai nelayan, serta struktur desa yang mulai membuka ruang partisipasi perempuan dalam musyawarah Pembangunan dan kemitraan strategis Puspita Bahari yang kuat. Dengan demikian, aksi kolektif yang dilakukan oleh perempuan nelayan dalam Puspita Bahari melampaui bentuk bertahan hidup, mencakup strategi politik yang cerdas, berlapis, dan menasar transformasi struktural.

## Penutup

Buah dari perjuangan dua dekade Puspita Bahari yaitu mulai bermunculan tokoh perempuan yang aktif menjadi motor perubahan. Dalam FGD, ditemukan bahwa semangat Puspita Bahari juga berkembang di Desa lainnya yang menunjukkan adanya transformasi sosial dalam bentuk kepemimpinan perempuan akar rumput. Para perempuan nelayan yang pernah diadvokasi oleh Puspita Bahari semakin percaya diri dengan identitas mereka, tanpa perlu bersembunyi dan berani menyuarakan pendapatnya. Mereka juga membentuk komunitas pemberdayaan perempuan di wilayahnya sendiri. Aksi kolektif ini memperlihatkan bahwa perempuan nelayan mampu mengembangkan kepemimpinan dan menjadi agen perubahan yang mampu mendefinisikan ulang peran mereka dalam pembangunan. Perempuan menggunakan solidaritas untuk memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan lokal. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman perempuan pesisir adalah narasi penting dalam pembangunan yang berkeadilan gender.

Pengalaman penulis bersama perempuan nelayan Puspita Bahari di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, membuka pemahaman mendalam bahwa marginalisasi perempuan tidak hanya berakar pada kemiskinan dan krisis iklim, tetapi juga tertanam dalam kebijakan publik yang tidak responsif terhadap realitas gender. Melalui lensa *Feminist Everyday Political Economy* (Elias & Rai 2018), terungkap bagaimana perempuan pesisir memikul beban yang berlapis dalam dimensi ruang, waktu, dan kekerasan—baik dalam bentuk ketidakadilan struktural, pembatasan akses, maupun stigma budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di tengah kondisi yang serba menekan ini, komunitas Puspita Bahari menghadirkan wajah lain dari resistensi dan perlawanan perempuan melalui aksi kolektif. Mereka membangun solidaritas, memimpin advokasi, mendirikan koperasi, serta mengartikulasikan

hak-hak mereka melalui aksi kolektif yang terstruktur dan bermakna.

Pendekatan teoretis dari Kabeer (2020) memperlihatkan bahwa aksi kolektif perempuan nelayan bukan hanya strategi untuk bertahan, melainkan juga salah satu bentuk agensi transformatif yang mampu menggeser norma sosial, membongkar struktur yang menindas, dan membangun kepemimpinan perempuan dari akar rumput. Transformasi ini terjadi mulai dari tingkat komunitas hingga jejaring lintas-wilayah yang berupaya memengaruhi kebijakan publik di sektor pesisir dan lingkungan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan gender tidak akan terwujud tanpa pengakuan dan pelibatan perempuan sebagai subjek perubahan.

Perempuan nelayan memiliki pengetahuan lokal, visi keberlanjutan, dan kekuatan kolektif yang layak menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan-bukan sekadar objek penerima program. Oleh karena itu, negara harus menjadikan pengalaman perempuan pesisir ini sebagai referensi dalam menyusun kebijakan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Integrasi pengalaman mereka akan memperkaya substansi kebijakan dan memastikan bahwa perspektif yang selama ini dipinggirkan dapat menjadi bagian dari kerangka solusi nasional. Sebagai langkah konkret, kerangka pengambilan keputusan berbasis pengalaman perempuan pesisir dapat diterapkan dengan memperkuat representasi perempuan di tingkat desa hingga nasional. Di Musrenbang, misalnya, kuota representasi perempuan nelayan dapat diterapkan untuk memastikan kebutuhan mereka terakomodasi dalam alokasi anggaran desa. Selain itu, pendekatan partisipatif seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dapat digunakan untuk mengintegrasikan perspektif perempuan dalam perencanaan kebijakan, terutama di sektor pesisir dan perikanan

Penulis meyakini bahwa suara perempuan pesisir harus ditempatkan sebagai sumber kebijakan, bukan sekadar data pelengkap. Ketika perempuan diberi ruang untuk menyuarakan pandangannya, mereka bukan hanya memperjuangkan kebutuhan dirinya, tetapi juga merawat komunitas dan lingkungan. Puspita Bahari menunjukkan bahwa dari ruang yang dibanjiri rob, bisa lahir gelombang perubahan besar. Inilah pelajaran penting dari perempuan pesisir: bahwa transformasi sosial dimulailah dari keberanian untuk bersuara, kebersamaan untuk bertindak, dan *keberanian dalam bermimpi besar!*

## Daftar Pustaka

- Azizi, A., Hikmah, & Pranowo, S. A. 2012. Peran Gender dalam Pengambilan Keputusan pada Rumah Tangga Nelayan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7(1), hlm. 113–125.
- Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., & Wrona, S. 2023. How Women Drove 'Spirits' out of Their Local Communities: The 'Exorcism' of Non-Governmental Organizations: A Comparative Case Study. *Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review)* 42, hlm. 157–188. <https://doi.org/10.12775/PBE.2023.019>.
- Elias, J. & Rai, S. M. 2018. Feminist everyday Political Economy: Space, Time, and Violence. *Review of International Studies* 45(2), 1–20. doi:10.1017/S0260210518000323.
- Evans, A. & Nambiar, D. 2013. *Collective Action and Women's Agency*. World Bank. Diakses dari Evans and Nambiar 2013. Collective action and women's agency. Dec 17.pdf.
- FAO. 2018. *Women's Participation and Leadership in Fisherfolk Organizations and Collective Action in Fisheries: A Review of Evidence on Enablers, Drivers and Barriers*. Diakses dari <https://www.fao.org>.
- Ghosh, A. & Ghosh, A. 2024. Empowering Rural Women in India: Self-help Groups as Catalysts for Development. *Futuristic Trends in Social Sciences* 3, 1–16.
- González-Malabet, M. 2023. Women's Political Participation through Social Movements and Nongovernmental Organizations: The Case of Compromiso Ciudadano in Medellín, Colombia. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 30(1), 93–114. <https://doi.org/10.1093/sp/jxac031>.
- Herdiansyah, F. et al. 2019. Socialization of Coral Reef Sustainability in Pari cay, Seribu Islands. *JAMIN Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 1(2), 21–47, doi: 10.25105/JAMIN.V1I2.5852.
- Kabeer, N. 2020. *Three Faces of Agency in Feminist Economics: Capabilities, Empowerment and Citizenship*. Dalam *Handbook of Feminist Economics* (ed. Berik & Kongar), Routledge.
- Kabeer, N. 2012. "The Power of Association," Thinkpiece 2, UK Feminista [http://ukfeminista.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/Naila-Kabeer\\_The-power-of-association.pdf](http://ukfeminista.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/Naila-Kabeer_The-power-of-association.pdf).
- Kitolelei, S. et al. 2022. Fisherwomen's Indigenous and Local Knowledge - the hidden gems for the management of marine and freshwater resources in Fiji. *Frontiers in Marine Science*, 1–17, DOI 10.3389/fmars.2022.991253.
- Laila, N. E. & Amanah, S. 2015. Livelihood Strategy of Coastal Women to Fishermen Family Income. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 159–168.
- Lefebvre, H. 1991. *The Production of Space*. Cornwall: Blackwell.
- Namirah, S. A. & Ruwaida, I. 2023. Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil. *Jurnal Perempuan* 28(2), hlm. 34–62. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.848>.
- OXFAM. 2013. *Women's Collective Action: Unlocking the Potential of Agricultural Markets*. Oxfam Policy & Practice. Diakses di <https://www.oxfam.org>.

- Pratiwi, A. M. & Gina, A. (2017). Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 6–33, <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4>.
- Safira, K. & Dar, H. A. 2024. Women Leaders in Local Governance: A Study of Rajouri's Panchayati Raj Institutions. *African Journal of Biomedical Research* 27(4s), 7874–7879. <https://doi.org/10.53555/AJBR.v27i4S.5106>.
- Utami, K. D. 2024, Jan 17. *Analisis Dampak Lingkungan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Dikritik*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/17/analisis-dampak-lingkungan-tol-tanggul-laut-semarang-demak-dikritik>.
- Villarsosa-Tanchuling, M. L. 2017. Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu, dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 54–69, <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4>.
- Wahyuni, S., Niko, N., & Elsera, M. 2022. Self-Agency Perempuan Nelayan di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Jurnal Bestari* 3(1), hlm. 48–59.
- Wahyuni, Y. 2017. Peran Produksi, Reproduksi, dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 94–118.
- Wardhani, E. K. 2017. Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan. *Jurnal Perempuan* 22(4), hlm. 70–93, <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4>.
- Wouthuyzen, S. R. et al. 2017. Upaya Pengelolaan Pesisir dan Laut Berkelanjutan Melalui Pendidikan Konservasi Sejak Dini di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. *Coastal and Ocean Journal* 1(2), hlm. 157–168, e-ISSN: 2549-8223.
- Youwikijaya, S. E. et al. 2023. Identification of Ownership and Access to Small Fishermen's Household Capital in Small Islands (Pari Island Case). *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 9(2), hlm. 87–100, DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v9i2.12003>.

